

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Bahasa*, Pustaka Cakra, Surakarta, 2014.
- Ismail, Suardi Wekke, et.al, *Metode Penelitian Sosial*, Gawe Buku, Yogyakarta, 2019.
- Ismu Gunadi Dan Joenadi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta 2014.
- Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Sleman, 2014.
- Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Dotplus, Riau, 2022.
- Nuru Qamar I, *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan*. Cv Social Politic Genius, Makassar, 2018
- Ramdani, *Putusan Pengadilan*, Mimbar Pustaka, Bandung, 2022.
- Sandu Sitoyo, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Alfabeta, Banndung, 2016.
- Surachman, *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi Di Berbagai Negara Edisi Kedua*. Sinar Grafika 2022.

Jurnal/Artikel :

- Aju Putrijanti dan Lapon Tukan Leonard, *Kompetensi Peratun Untuk Memeriksa Unsur Penyalahgunaan Wewenang*, Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan Volume. 7 Nomor. 1, 2019
- Andi Intan Purnamasari, *Dekriminalisasi Tindak Pidana : Membedah Keadilan Bagi Terpidana Dan Mantan Terpidana*, Gorontalo Law Review, Volume 2 Nomor.1 2019.
- Andry Yosep Manalu, Idham Idham, dan Erniyanti Erniyanti, “*Analisis Teori Hukum Positif Dan Teori Sistem Hukum Terhadap Perbuatan Tidak*

- Melaporkan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika,” Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan, Volume 1 No. 2 , 2023.*
- Dedy Chandra Sihombing, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, dan Mahmud Mulyadi, *Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif*, Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2, 2023.
- Dewa Gede Atmadja, *Asas-Asas Dalam Sistem Hukum*, Jurnal Kertha Wicaksana Volume 12 Nomor 2 2018.
- Dian Rosita, *Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Ius Constituendum Volume 2, 2018.
- Dina Mariana, Bintang Olga Natalia Saragih, dan Qemal Candra Maulana, *Penyitaan Aset sebagai upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara*, JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) Volume 5 Nomor 8, 2022.
- Dinda Anjani Yudha dan Dadi Mulyadi Nugraha, *“Dampak Dan Peran Hukum Fenomena Catcalling Di Indonesia,”* Dinamika Sosial Budaya, Volume 23, No. 2 2021.
- Efryan R. T. Jacob, *Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964*, Lex Crimen Volume. VI Nomor. 1, 2017.
- Enrico Simanjuntak, *Kewenangan Hak Uji Materil Pada Mahkamah Agung RI*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 3 2018.
- Farida Sekti Pahlevi, *“Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M.Freidman,”* Jurnal El-Dusturie, Volume 1, 2022.
- Farida Wulandari, Soerya Respationo, dan Erniyanti Erniyanti, *“Juridical Analysis Of The Mechanism Of Non-Conviction Based Asset Forfeiture In The Settlement Of Corruption Crimes,”* International Journal of Social Science and Humanity, Volume 1 nomor 3, 2024.

- Fiona L. Pelafu, *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lex Crimen Volume VI Nomor 3. 2017.
- Hafri Sundhana, “Upaya Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Eksekusi Putusan Pidana Tambahan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat),” Unes Law review, Volume 2, 2020.
- Herry Anto Simanjuntak and Rikawati Ginting Munthe, “Peranan Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Dalam Membantu Masyarakat Tidak Mampu,” Al Ahkam ,Volume 16, 2020.
- I Kadek Darma Santosa, Ni Putu Rai Yulianti, dan Dewa Gede Sudika Mangku, *Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 9 NO.1, (2021)
- I Komang dan Pasek Gunadi, “Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Klungkung” Volume 23 No. 2, 2024.
- Ias Muhlashin, Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Al-qadau Volume 8 No. 1, 2021
- Ismail, MH. Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi, Legalite : Jurnal Perundang-undangan Dan Hukum Pidana Islam Volume 2 Nomor 2 (2017).
- Ita Royani. *Independensi Kewenangan Jaksa Dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Lex Librum Volume 10 Nomor 2, 2024.
- Kurniawan, I. W. E., Dewi, A. A.S L., & Widyantara, I. M. M. Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 1 Nomor 2 tahun 2020.

- Kornelia Melansari dan D Lewokeda, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, Mimbar Keadilan Volume. 14 2018.
- Lia Hartika, Indri Dithisari, and Syarifah Lisa Andriati, “*Urgensi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Oleh Jaksa Eksekutor Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*,” *Binamulia Hukum*, Volume 11 No.2,
- M Alatas, Mulyati Pawennei, and Muhamamd Kamal, “*Efektivitas Pelaksanaan Penelusuran Aset (Asset Tracing) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*,” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* Volume 5, Nomor. 2 2024.
- M Yogi Prianto, *Analisa Hukum Tentang Tindak Pidana Akses Bandwidth Tanpa Izin Pada Perusahaan Telekomunikasi*,” *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 4 Nomor 2, 2022.
- Moh Yusril, “*Implementasi Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Donggala)*,” *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*, Volume 1, Tahun 2024.
- Mochamad Ramdhan Pratama, “*Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*,” *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volumr 4 No. 2, Tahun 2020.
- Mutiara Dwi Nawangwulan, “*Pengembangan Media Interaktif Spin Game Dalam Meningkatkan Pemahaman Tentang Pemimpin Dalam Islam Di Sekolah Dasar*,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 6 No.2, Tahun 2022.
- Nitaria Angkasa, Intan Pelangi, And Muhammad Agung Setiawan, “*Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Bukti Rampasan Tindak Pidana Narkotika*,” *Muhammadiyah Law Review*, Volume 7 Tahun 2023.

- Olivia Taher, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Yang Mengandung Pemidanaan Berdasarkan Pasal 193 Kuhap*, Lex Crimen Volume VIII Nomor, Tahun 2018 .
- Priyo Hutomo Puslemasmil, “*Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer*,” Jurnal Hukum dan Perundang-undangan, Volume 1 No. 1, Tahun 2021.
- Reza Noor Ihsan, “*Telaah Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslaag Van Recht Vervolging) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*”. Beloom Bahadat, Volume 12 No.1, 2022.
- Rizky Malinto Ramadani, *Tinjauan Analisis Kejaksaan Republik Indonesia Perspektif Budaya Organisasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 19 No.1. Tahun 2020.
- Rokilah, *Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law*, Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020.
- Ryvaldo Vially Korua, Harold Anis, Youla O. Aguw “*Kajian Hukum Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Pidana*”. Lex Crimen Volume 9 No.2, Tahun 2020.
- Sari, N. W. Kewenangan Kejaksaan Dalam Penanggulangan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018.
- Sutrisno, “ *Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi*”. Gorontalo Law Review, Volume 6 No. 2, Tahun 2020.
- Syarif Saddam Rivanie, “*Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*”, Halu Oleo Law Review, Volume 6, Tahun 2022.
- Tarbiyatul Bukhary, “*Korupsi Dan Prilaku Koruptif*,” Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama dan Sains, Volume 2, Tahun 2021.

- Wildan Mucchladun. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Volume 6, Tahun, 2015.
- Yuni Yanti dan Bahder Johan Nasution, *Fungsi Wakil Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Limbago: Journal Of Constitutional Law, Volume 1 No. 2, Tahun 2021.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor Tentan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.